



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sekaligus sebagai pedoman penyusunan Anggaran serta merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari Renstra BPKAD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2024 serta rencana estimasi program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 serta tujuan dan sasaran dari masing-masing program. Pada Tahun 2024 BPKAD merencanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan.

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan guna perbaikan kinerja organisasi dimasa yang akan datang.

Sidoarjo, 10 April 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE

NIP. 19720317 199602 2001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	4
	1.2. Landasan Hukum	5
	1.3. Maksud dan tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	33
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	44
BAB IV	PENUTUP	66
LAMPIRAN	:	
Tabel	: 2.1. Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2022	
Tabel	: 2.2. Indikator Kinerja Tujuan BPKAD	
Tabel	: 2.3. Indikator Kinerja Utama BPKAD	
Tabel	: 2.4. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022	
Tabel	: 2.5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
Tabel	: 2.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel	: 2.7. Rancangan Awal BPKAD TA 2023 Seteiah Rasionalisasi	
Tabel	: 3.1. Tujuan, Indikator dan Target	
Tabel	: 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara iugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang – undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan yang memuat Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD yang telah ditetapkan untuk satu tahun

mendatang, Renja sekaligus sebagai acuan dan pedoman penyusunan Anggaran BPKAD dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk itu, tujuan Penyusunan Renja BPKAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menegaskan tujuan, sasaran, program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2024 yang merupakan implementasi dari Renstra BPKAD Tahun 2021 – 2026;
2. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tujuan, sasaran, program, indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD Tahun 2024;
3. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi serta dalam rangka menilai kinerja organisasi;
4. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan BPKAD dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja (Renja) BPKAD disusun berdasarkan Lampiran VI Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.5. Latar Belakang	4
	1.6. Landasan Hukum	5
	1.7. Maksud dan tujuan	6
	1.8. Sistematika Penulisan	7
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
	2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat	33
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	

	3.4 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
	3.5 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
	3.6 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	41
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	44
BAB IV	PENUTUP	66
LAMPIRAH	:	
Tabel	: 2.1. Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2021-2022	
Tabel	: 2.2. Indikator Kinerja Tujuan BPKAD	
Tabel	: 2.3. Indikator Kinerja Utama BPKAD	
Tabel	: 2.4. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022	
Tabel	: 2.5. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	
Tabel	: 2.6. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
Tabel	: 2.7. Rancangan Awal BPKAD TA 2023 Setelah Rasionalisasi	
Tabel	: 3.1. Tujuan, Indikator dan Target	
Tabel	: 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melakukan evaluasi kinerja ada tahapan yang harus dilakukan yaitu melalui Pengukuran Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, mengevaluasi dan melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi BUD;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, BPKAD memiliki tugas yang cukup strategis dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Perubahannya serta Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disamping itu, BPKAD juga mempunyai tugas untuk merumuskan perencanaan Belanja, pengelolaan keuangan daerah serta penyeienggaraan perbendaharaan Umum Daerah.

Dari tugas dan fungsi BPKAD diatas, program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : BPKAD ikut serta mendukung pencapaian visi misi dan

Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal ini ditunjukkan melalui misi I (satu) yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puhlik dan Kemudahan Berusaha”**. Untuk mewujudkan misi tersebut, BPKAD Kabupaten Sidoarjo ikut serta berkontribusi kepada pencapaian program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Tahun 2021-2026, berikut Program BPKAD yang mendukung :

1. Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT, meliputi program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Tingkatkan ADD untuk Desa Sejahtera, meliputi program :
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sesuai dengan Renstra 2021-2026 terdapat 2 (dua) sasaran adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Sesuai Ketentuan dan Akuntabel dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama BPKAD adalah Persentase Laporan Keuangan PD yang sesuai SAP, Persentase Aset Tetap Terdokumentasi Legal, Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP, Nilai IKM/SKM., berikut kami sajikan Renstra BPKAD 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Hasil Kinerja BPKAD Kabupaten Sidoarjo Periode 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran BPKAD	Target Renstra PD pada tahun		Realisasi Capaian pada tahun		Rasio Capaian pada tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase aset tetap terdokumentasi legal.	100%	99,85%	100%	99,60%	100%	99,75%

Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator :

1. Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP

Pada Indikator Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP bahwa realisasi telah mencapai target 100% Tahun 2021 dan Tahun 2022 mencapai 100% dapat disimpulkan dalam indikator Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP telah optimal.

2. Persentase aset tetap terdokumentasi legal.

Pada Indikator Persentase aset tetap terdokumentasi legal bahwa realisasi telah mencapai target 99,85% Tahun 2021 dan Tahun 2022 mencapai 99.60% dapat disimpulkan dalam indikator Persentase aset tetap terdokumentasi legal telah optimal

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

1) Pengukuran Keherhasilan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Tahun 2022

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Tujuan BPKAD

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian	Kategori	Penanggung jawab	Keterangan
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas	Opini atas Audit BPK	100 %	Berhasil	Seluruh OPD	Pemeriksaan Tahun 2022 terhadap LKPD Tahun 2021

Sumber Data : Laporan Hasil Pemeriksaan

Keterangan :

No	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan di Tahun 2022, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Sidoarjo mempunyai satu tujuan yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas dengan indikator kinerja tujuannya adalah "Opini atas Audit BPK".

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjejasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya.

➤ Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkualitas

1) Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

- a) Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- b) Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset;

- c) Kepala OPD selaku pengguna BMD kurang optimal dalam mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
 - d) Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN.
- 2) Upaya yang telah dilakukan :
- a) Verifikasi penempatan kode rekening guna meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penempatan kode rekening;
 - b) Melakukan pendampingan dan mengikutsertakan Pendidikan/ pelatihan kepada para pengelola keuangan terkait pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - c) Penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
 - d) Memfasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil;
 - e) Melakukan pendampingan dan rekonsiliasi BMD tiap triwulan antara Pengurus Barang OPD dengan staf pengelola BMD;
 - f) Memasang patok tanda batas tanah;
 - g) Peningkatan koordinasi dengan OPD maupun BPN dalam rangka percepatan pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- 3) Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :
- a) Pelaksanaan pelatihan/bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Rekonsiliasi dan pendampingan penyusunan LKPD;
 - c) Menyusun Petunjuk Teknis Penatausahaan Laporan Keuangan;
 - d) Penyusunan kebijakan akuntansi;
 - e) Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKSDA) dan SIM Barang Milik Daerah (SIM BMD);
 - f) Pelaksanaan bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah;
 - g) Pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap dengan OPD;
 - h) Pemrosesan sertifikat tanah.
- 4) Simpulan atas pencapaian kinerja :
- Opini atas audit BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

kedeiapan kalinya setelah 7 (tujuh) tahun berturut – turut, yaitu Tahun 2013 dan 2014 dengan opini WTP dengan paragraph penjelasan, sedangkan 2015 – 2019 menjadi WTP murni tanpa paragraph penjelasan. Untuk lebih meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang berkuaiitas, pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kegiatan pendukung dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pengelolaan dan pelaporan yang lebih akuntabel.

Adapun strategi – strategi untuk mempertahankan opini audit BPK antara lain:

- a) Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran;
- c) Peningkatan kualitas laporan keuangan;
- d) Peningkatan monitoring dan evaluasi;
- e) Peningkatan Pengelolaan barang milik daerah dengan tertib administrasi, tertib jumlah dalam pencatatan dan tertib hukum.

5) Solusi dan upaya perbaikan di tahun mendatang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa terhadap capaian kinerja tersebut, maka terdapat catatan dan rekomendasi yang menjadi solusi dan upaya untuk perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang, antara lain :

- 1) Peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah dan aset daerah;
- 2) Optimalisasi pemanfaatan SIKSDA dan SIM BMD guna menyajikan laporan yang akurat dan akuntabel;
- 3) Peningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka percepatan proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2) Pengukuran Kinerja Tahunan BPKAD Tahun 2022

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama BPKAD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian (%)	Kategori	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.	a. Persentase Laporan Keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP	100%	Berhasil	Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		b. Persentase aset tetap terdokumentasi legal.	99,75%	Berhasil	Bidang Aset

Sumber data: Laporan Bid. Perbendaharaan, Laporan Keuangan, Laporan BMD

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

a. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi dan Upaya Perbaikan di Tahun Mendatang

- Sasaran : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021–2026. Dari masing–masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP

- a) Kendala/Permasalahan yang dihadapi:

Kurangnya pemahaman PD dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP;

- b) Upaya yang telah dilakukan:

1) Pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP;

- 2) Bimbingan teknis pengelolaan keuangan;
- 3) Penyusunan kebijakan akuntansi.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya:
 - 1) Rekonsiliasi laporan keuangan;
 - 2) Rekonsiliasi laporan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan setiap triwulan;
 - 3) Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Pengembangan dan optimalisasi aplikasi SIKSDA.
- d) Simpulan Atas Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan dan dikategorikan "**berhasil**". Adapun SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perangkat daerah.
- e) Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang

Pendampingan penyusunan laporan keuangan yang lebih intensif guna meminimalisir tingkat kesalahan PD dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP.

2. Persentase aset tetap terdokumentasi legal.

- a) Kendala/Permasalahan yang dihadapi:
 - 1) Pengguna barang kurang memahami kewajiban dalam pengamanan hukum dan administrasi aset yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) Proses sertifikasi dipengaruhi oleh pihak eksternal dalam hal ini BPN;
 - 3) Adanya penolakan dari desa dalam proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah;
- b) Upaya Yang Telah Diiakukan
 - 1) Pemanfaatan aplikasi mapping tanah;
 - 2) Sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis kepada pengguna barang terkait hak dan kewajiban dalam pengelolaan dan pengamanan aset (BMD);
 - 3) Koordinasi dengan OPD terkait kelengkapan persyaratan untuk pengurusan sertifikat;
 - 4) Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan BMD;

- 5) Penelusuran dokumen BMD guna tertib administrasi;
 - 6) Pemasangan papan nama aset daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - 7) Pemasangan patok batas tanah;
 - 8) Koordinasi secara intensif dengan BPN guna percepatan pemrosesan sertifikat tanah;
 - 9) Penambahan anggaran untuk pensertifikatan tanah.
- c) Rencana Tindak Lanjut di Tahun Berikutnya:
- 1) Koordinasi secara terus menerus dengan BPN untuk percepatan penerbitan sertifikat;
 - 2) Inventarisasi dan *update* data aset tanah;
 - 3) Pemanfaatan dan optimalisasi aplikasi mapping tanah untuk menginventarisir kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - 4) Sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa, bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN.
- d) Simpulan Atas Capaian Kinerja
- Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 99,75% dengan kategori "**berhasil**", dimana masih banyak aset tetap berupa tanah yang belum bersertifikat. Sebagaimana tahun – tahun sebelumnya realisasi target indikator ini tidak dapat diperhitungkan capaiannya secara parsial, karena sepenuhnya dipengaruhi oleh proses sertifikasi yang dilakukan oleh BPN, kecepatan dan realisasi sertifikasi atas bidang tanah tidak dapat ditentukan.
- e) Solusi dan Upaya Perbaikan Di Tahun Mendatang
- 1) Koordinasi secara terus menerus dengan OPD dan BPN terkait percepatan sertifikasi tanah;
 - 2) Pemanfaatan dan optimalisasi aplikasi mapping tanah untuk menginventarisir kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - 3) Melaksanakan kegiatan sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa, bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN.
- Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah.
- Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 4 (empat) indikator. Dari masing–masing Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

b. Analisis Pencapaian Program Pendukung

- **Sasaran 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan, transparan dan akuntabel.**

Tablei 2.4

Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan kesekretariatan	80%	100%	90,975 %	Sangat Berhasil
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu penyampalan Dokumen Rancangan KUA-PPAS/Perubahan KUA-PPAS	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Berhasil
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Tepat Waktu	100%	100%	Berhasil
		Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBO	Tepat Waktu	100%	100%	Berhasil
		Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	100%	96.20%	100%	Berhasil
		Prosentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	100%	100%	100%	Berhasil
4	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah	Prosentase aset tetap tanab yang telab bersertifikat	100%	100%	100%	Berhasil
		Prosentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	49.50%	28.00%	56.57%	Kurang
		Prosentase pemanfaatan BMD yang diproses	100%	100%	100%	Berhasil

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
		Prosentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	100%	100%	100%	Berhasil

Sumber data : Laporan sekretariat, Laporan Bidang Anggaran, Laporan Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Laporan Bidang Aset

Keterangan :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Untuk mendukung atas target kinerja tujuan dan sasaran tersebut diatas dilakukan melalui 3 (tiga) program dengan 10 (sepuluh) indikator. Sebagian besar target kinerja dapat tercapai dengan kategori **"sangat berhasil dan berhasil"**, untuk 9 (sembilan) indikator kinerja program, namun terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori capaian kinerja **"kurang"**.

Indikator kinerja program dengan kategori capaian kurang adalah Persentase aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD. Adapun yang dimaksud dengan aset tetap (tanah) yang telah diinventarisasi dalam laporan BMD merupakan aset tetap (tanah) yang telah bersertifikat, ketidaktercapaian tersebut dikarenakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- 1) Kurang komitmen OPD dalam pengamanan aset;
- 2) Kurang lengkapnya dokumen pendukung pengurusan sertifikat yang disampaikan OPD;

Solusi yang telah dilakukan untuk permasalahan tersebut diatas antara lain:

- 1) Membentuk Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Aset;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
- 3) Penelusuran dokumen guna tertib administrasi;
- 4) Koordinasi dengan BPN untuk percepatan proses sertifikasi tanah;

c. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 2.5
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.547.884.868	14.082.953.753	96.82
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	713.020.222.240	697.376.712.328	97.80
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.373.858.318	6.082.821.975	72.64
Total	735.941.965.426,00	717.542.488.056,00	89.08

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 sebesar Rp. 717.542.488.056,00 dengan capaian sebesar 89.08% dari pagu anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 735.941.965.426,00.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SPKAD Kabupaten Sidoarjo

Rencana Strategis (Renstra) pada suatu organisasi memberikan panduan arah dan prioritas strategis organisasi lima tahun kedepan. Arah dan prioritas organisasi ini sangat bergantung pada harapan dan tuntutan para *stakeholder* terhadap organisasi.

Pada sub-bab Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, akan dianalisa terkait masalah pokok atau masalah makro Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci. Masalah pokok, masalah dan akar masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjukkan dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menjaga dan mengoptimalkan kinerja BPKAD, dalam mengelola keuangan dan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pemahaman penganggaran, penatausahaan keuangan dan BMD di masing – masing PD belum optimal; 2. Masih banyak aset tanah milik Pemkab Sidoarjo yang belum bersertifikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran terkait pengelolaan keuangan PD; 2. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada

			lembaga lain yaitu BPN; 4. Setiap tahun barang milik daerah pemkab Sidoarjo akan terus bertambah.
--	--	--	--

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo :

1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah di masing – masing PD belum optimal;
2. Kurang memadainya kompetensi SDM pengelola keuangan dan BMD;
3. Belum terintegrasinya sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dengan manajemen aset;
4. Masih banyak aset tanah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang belum bersertifikat dikarenakan Penerbitan sertifikat aset tanah bergantung pada lembaga lain yaitu BPN;
5. Adanya penolakan dari desa dalam proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.

Upaya yang dilakukan BPKAD untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Melaksanakan rekonsiliasi BMD tiap triwulan antara Pengurus Barang OPD dengan staf pengelola BMD;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknik pengelolaan keuangan daerah;
3. Menyusun petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
4. Pelaksanaan inventarisasi BMD;
5. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Memasang papan nama aset atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
7. Pengurusan sertifikat tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ke depan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Manajemen Aset Daerah;
- (2) Pelaksanaan rekonsiliasi aset tetap yang berasal dari dana BOS;
- (3) Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Rekonsiliasi dan pendampingan penyusunan LKPD;
- (5) Menyusun Petunjuk Teknis Penatausahaan Laporan Keuangan;

- (6) Berupaya terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan dan pihak Desa terkait percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- (7) sosialisasi proses sertifikasi kepada pemerintah desa, bekerjasama dengan Kecamatan dan BPN

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review Indikator Target dan Anggaran BPKAD Kabupaten Sidoarjo dilakukan Tahun 2023, dimana hasil review tersebut terdokumentasi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan anggaran setiap tahunnya yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Review dilakukan dari hasil evaluasi capaian target masing-masing indikator tahun sebelumnya, adanya perubahan peraturan perundang-undangan, serta kondisi keuangan daerah. Berikut kami sajikan review terhadap rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2023 (setelah rasionalisasi) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7

Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023 (setelah rasionalisasi)

Rancangan awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan						
Kode	Program/kegiatan/ sub. kegiatan	Lokasi	Indikator	Target capaian Renstra	Pagu indikator (dlm ribuan)	Kode	Program/kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator	Target capaian Renstra	Pagu indikator (dlm ribuan)
02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A		Tingkat aparatur daerah pelayanan kesekretariatan			02.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat aparatur daerah pelayanan kesekretariatan		643,403,895,822
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,900,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.900.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan penganggaran disusun ketentuan		5,900,000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai ketentuan		5.900.000
			Jumlah laporan kinerja disusun						Jumlah laporan kinerja disusun		
			dokumentasi evaluasi PD yang sesuai						dokumentasi evaluasi PD yang sesuai		

		ketentuan					ketentuan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	10,259,384,010			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		10.270.423.671
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10,259,384,010			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10.270.423.671
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		948,890,545			Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.332.897.086
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34,526,607			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		34.526.607
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	73,861,159			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		123.746.759
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	228,000,000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		228.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13,387,349			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		13.387.349
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2,280,000			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2.280.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	11,875,000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu		11.875.000
Penyelenggaraan	Penyelenggaraan	Jumlah Laporan	584,960,430			Penyelenggaraan	Jumlah Laporan		919.081.371

Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146,631,000						1.222.521.322
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	28,971,000						114.052.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117,660,000						1.108.468.822
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,355,154,400						2.235.754.400
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000						1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	768,000,000						768.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,586,154,400						1.466.754.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Milik Penunjang Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256,500,000						445.345.000

	Daerah		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		70,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	195.000.000
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		135,000,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130.000.000
			Jumlah Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		51,500,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	120.345.000
			Ketepatan penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan PPAS		4,303,799,264		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Rancangan KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS	672.602.755.017
			Ketepatan penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD					Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperbup APBD/PAPBD	
			Ketepatan penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD					Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	Ketepatan waktu penyampaian Dokumen Raperda APBD/PAPBD	
			Persentase yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan					Persentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan	Persentase SKPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang sesuai dengan	

											SAP	
											Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1,114,571,332							Persentase Dokumen anggaran daerah yang tersusun	672.602.755.017
											Persentase Dokumen kebijakan yang tersusun	1.336.195.469
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				904,981,332							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.157.580.469
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				174,290,000							Jumlah Peraturan Daerah Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	139.315.000
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				35,300,000							Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Bidang Anggaran	39.300.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				300,073,747							Persentase penerbitan SP2D yang tepat waktu	299.881.975

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	300,073,747		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	299.881.975
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	364,404,185		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun sesuai ketentuan	566.744.185
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	58,679,185		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	209.544.185
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Daerah yang Terkonsolidasi	305,725,000		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	357.200.000
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	2,524,750,000		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran belanja transfer	670.399.933.388

	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2,520,000,000		Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	2.520.000.000
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	504,810,901,900		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	533.112.260.200
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10,004,750,000		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	16.204.000.000
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	107,395,777,912		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	118.563.673.188
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	2,920,956,791		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang tepat waktu dalam penyampaian laporan BMD	4.055.685.237
		Persentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat				Persentase aset tetap tanah yang telah bersertifikat	
		Persentase pemanfaatan BMD yang diproses				Persentase pemanfaatan BMD yang diproses	
		Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum				Persentase pemindahtanganan BMD yang diproses melalui lelang umum	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	2,920,956,791		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase permohonan pemindahtanganan BMD yang diproses	4.055.685.237
		Jumlah PD yang tepat				Jumlah PD yang tepat	

	waktu penyampaian laporan BMD	dalam laporan BMD								waktu penyampaian laporan BMD	dalam laporan BMD
		Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses								Persentase permohonan pemanfaatan BMD yang diproses	
		Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN								Persentase permohonan penerbitan sertifikat tanah yang diproses oleh BPN	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		306,400,000			Penatausahaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	364.080.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		2,178,650,000			Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2.369.710.000
	Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		435,906,791			Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.321.895.237

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif".

Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan target.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak

harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**.

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari BPKAD Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puhlik dan Kemudahan Berusaha"**.

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap PD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran PD. Secara rinci tujuan dan sasaran dapat diuraikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

- Tujuan : Mewujudkan penyeienggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- Sasaran :
 - Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel.
antara iain :
 1. Persentase Laporan Keuangan OPD yang sesuai SAP;
 2. Persentase Aset Tetap Terdokumentasi Legal.
 - Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah.
antara iain :
 1. Nilai SAKIP;
 2. Nilai RB;
 3. Nilai IPP;
 4. Nilai IKM/SKM.
- Indikator : Opini atas audit BPK

Tabel 3.1
Tujuan, Indikator dan Target

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Indikator Sasaran	Sasaran	Penanggung Jawab Data	Sasaran	Indikator Sasaran	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data
			2	2	2	2	2	2						2	2	2	2	2	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Opini atas laporan BPK	W TP	W TP	W TP	W TP	W TP	W TP	Opini atas laporan BPK merupakan opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK	Bidang Anggaran, Bidang Perencanaan & Akuntansi, Bidang Aset	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang sesuai ketentuan dan akuntabel	a. Persentase Laporan keuangan anggaran PD yang sesuai SAP/Jumlah PD)x100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan PD (Jumlah laporan keuangan PD yang sesuai SAP/Jumlah PD)x100%	Laporan Keuangan PD	Bidang Perencanaan dan Akuntansi
			99,75%	99,85%	99,96%	99,96%	99,96%	99,97%	99,97%				b. Persentase Aset tetap terdokumentasi legal	99,75%	99,85%	99,96%	99,96%	99,97%	99,97%	Aset tetap dengan dokumentasi legal adalah Aset tetap yang telah memiliki suatu catatan atau rekaman yang dapat dibuktikan keabsahannya atau dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Adapun dokumen tersebut berupa:	1. Laporan Barang Milik Daerah 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Perencanaan dan Akuntansi, Bidang Aset

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja							Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data												
			2	2	2	2	2	2	2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Indikator Sasaran	Sasaran	Penanggungjawab Data	Sumber Data	Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab Data								
			2	2	2	2	2	2															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
													3,9 9 (B)	A-	A-	A-	A-	A-	A-	A-	indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi	Hasil penilaian IPP	Sekretaria t
													d. Nilai IKM /SKM	84,65	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	SKM adalah data dan informasi tentang tingat kepuasan masyarakat yang diperoleh data hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Hasil penilaian SKM	Sekretaria t

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja						Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data	Indikator Sasaran	Target capaian kinerja	Indikator Sasaran	Penanggung Jawab Data	Sumber Data	Formulasi Perhitungan / Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab Data				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025												2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
													96,5%	95%							Serapan anggaran adalah besaran persentase realisasi atas anggaran belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA (Realisasi anggaran belanja/anggaran belanja)x100%	SIKSDA	Sekretaria t, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan & Akuntansi, Bidang Aset

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD telah disusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun, rencana pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan :

- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Balanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
2. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

d. Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH RABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitas Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 2. Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Tahun 2024 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Rancangan Akhir Renja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ARIBR PERENCANAAN REGISTRASI OPD	REALISASI CAPAIAN REKJA OPD TAHUN 2022	PRAKTISAN POKJAN TARGET REKJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN		PRAKTISAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		14	15	16
							8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
1	2																	
		BADAN PEMBELAJAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH																
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														0,00		
5.02		KEUANGAN														0,00		
5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan & esensialitas	Persn		Persn				20.828.989.101,00						0,00		
5.02.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun sesuai kebutuhan b. Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai kebutuhan	dokumen dokumen		dokumen dokumen				14.699.701.790,00					80 Persn	0,00		
5.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen				7.750.000,00					2 Dokumen	0,00		
5.02.01.2.01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	Persn		Persn				10.270.423.071,00					0 Orang/bulan	0,00		
5.02.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA RPDP	REALISASI CAPAIAN RENCANA RPDP TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN RENCANA RPDP TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELompok SASARAN	PROGNOSA MAJU RENCANA TAHUN 2023		PEMANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	RUMBER DANA	DAERAH NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	0 Orang/bulan	10.270.420.000,00	Kab. Subang, Serang, Kecamatan, Serang Kar/Desa	PEMDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11	17	13	15	16	17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Personalia ASN yang dapat Personalia ASN yang mendapat pelatihan yang bermanfaat	person person		person person	80 person 80 person	10.545.000,00						0 Orang	0,00		
5.02.01.2.05.10	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		Orang	0 Orang	10.545.000,00	Kab. Subang, Serang, Kecamatan, Serang Kar/Desa	PEMDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan masyarakat	nilai		nilai	target baik status	1.000.702.394,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA TAHUN 2022	PRAKTIKUM CAPAIAN TARGET RENJANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKTIKUM MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								15.136.880.00	-Kab. Sragen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Sistem Perencanaan dan Penganggaran Publik	IPPT - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Peralat Peralengkapan Kantor yang Dihasilkan	Paket		Paket	0 Paket	102.480.751.00	- Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		IPPT - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		0 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUK PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (%)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4 Jumlah Paket Barah Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	6	7 Paket	8 0 Paket	9 214.367.033,00	10 - Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13 PPT - Peningkatan Ke berhasilan, Keterampilan, Umum dan Kualitas pekerjaan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	14	15 0 Paket	16 0,00	17 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	Paket		Paket	0 Paket	13.364.400,00	- Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		ppt - Peningkatan Ke berhasilan, Keterampilan, Umum dan Kualitas pekerjaan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur		0 Paket	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.08		Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Pendukung undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / URUSAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET ANALISIS PENGANTARA REVISI OPD	REALISASI CAPAIAN REMAJIA OPD TAHUN 2022	PRANGKAP CAPAIAN TARGET REMAJIA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELompok Sasaran	PRANGKAP MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4 Jumlah Dokumen Bahan Berkas dan Perencanaan Perundang-undangan yang Disiapkan	5 Dokumen	6	7 Dokumen	8 0 Dokumen	9 2.520.000,00	10 - Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13 PP7 - Peningkatan Kelembagaan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah 13 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7 - Penguatan Organisasi Masyarakat Lokal dalam Penguatan dan Menopokkan Suseptabilitas yang Selaras, Toleran, Terbuka, dan Nyaman	14 14	15 0 Dokumen	16 10 0,00	17 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
	5.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Temu		Laporan	Laporan	Laporan	0 Laporan	15.817.500,00	- Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kelembagaan dan Penataan Organisasi Pemerintah Daerah 13 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7 - Penguatan Organisasi Masyarakat Lokal dalam Penguatan dan Menopokkan Suseptabilitas yang Selaras, Toleran, Terbuka, dan Nyaman	0 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	
	5.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Laporan	Laporan	0 Laporan									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANHER PERIODE RESTRADA OPD	REALISASI CAPAIAN REJAJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJAJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SISWA	PRAKIRAAN BALIK BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2			Laporan		Laporan	0 Laporan	1.287.750.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyusunan Rapor Koordinasi dan Komutasi SKPD				0 Laporan			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD		Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	9.235.750,00	- Kab. Sidoarjo, Sleman, Kecamatan, Semua Kelurahan	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PALI)				0 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penyusung Utusan Pemerintah Daerah		unit		unit	13 unit	288.547.980,00						0 Unit	0,00	
	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kandang Perorangan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan		unit		unit										

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANKER PERODE REINSTRUMENTASI OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRARUBAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2			Unit	Unit	Unit	0 Unit	11 875 000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perangkit Dinas Jitu, Kendaraan Dinas Jabatan yang Didatangkan				0 Unit				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Prokubank em Dan Tri reformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peta ngkatan Ke tentarian, Kertiraban, Umum dan penguatan in tuatitas penerapan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Unit	10	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Didatangkan	Unit	Unit	Unit	0 Unit	20.665.980,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peta ngkatan Ke tentarian, Kertiraban, Umum dan penguatan in tuatitas penerapan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Unit		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.08	Pengadaan Perawatan dan Mesh Lainnya		Unit									PP7 - Peta ngkatan Ke tentarian, Kertiraban, Umum dan penguatan in tuatitas penerapan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET AJER PERIODE PENYERAH CPD	REALISASI CAPAIAN RENJA CPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA CPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERAANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MALU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4 Jumlah Unit Perawatan dan Medis Lainnya yang Didistribusikan	5 Unit	6	7 Unit	8 0 Unit	9 249.862.000,00	10 - Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13 Pp7 - Peningkatan Kelestarian dan Keberlanjutan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur	14 14	15 0 Unit	16 0,00	17 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit			0 Unit	7.125.000,00	- Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PEHDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pp7 - Peningkatan Kelestarian dan Keberlanjutan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur		0 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persan			80 Persan	1.783.640.178,00				Penguatan Penguasaan Masyarakat Desa dan Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Timur		0 Laporan	0,00	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Sifat Menyurut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANJUR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN MINERJIA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)				
1	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surf Menyurat	Laporan		Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	- Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan dan Daya Unggul Pemerintahan Publik	12	13	14	15	16	17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Cenderung	Laporan		Laporan	0 Laporan	388.642.576,00	- Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa	10	PEMDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan dan Daya Unggul Pemerintahan Publik	12	13	14	15	16	17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan		Laporan	0 Laporan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disalurkan	Laporan		Laporan	0 Laporan	1.401.987.600,00	- Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua RT/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketahanan, dan Daya Unggul Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09	09	Pemeliharaan Bening Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan bening milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang layak fungsi	Persn		Persn	100 Persn	478.092.577,00						0 Unit	0,00	
5.02.01.2.09.01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan abayarkannya	Unit		Unit	0 Unit	137.582.577,00	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Semua RT/Desa	RENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperluas jangkauan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Perorangan Dinas Jabatan	PP7 - Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketahanan, dan Daya Unggul Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.01.2.09.06	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERENCANAAN RENCANA KERJA RPJMD	REALISASI CAPAIAN RENCANA KERJA RPJMD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA KERJA RPJMD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2023	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2		Jumlah Penerimaan dan Melewati Lainnya yang Dipengaruhi	Unit		Unit	0 Unit	269.000.000,00	- Kab. Sidoarjo, Kecamatan Kecamatan Semuar, Desa Semuar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11	12	13	14	15	16	17	
							0 Unit	269.000.000,00	- Kab. Sidoarjo, Kecamatan Kecamatan Semuar, Desa Semuar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11	12	13	14	15	16	17	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	Unit		Unit	0 Unit	51.500.000,00	- Semar, Kota/Kab, Semar, Kecamatan, Semar Nelf/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Unit			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	Unit		Unit	0 Unit	51.500.000,00	- Semar, Kota/Kab, Semar, Kecamatan, Semar Nelf/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Unit			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / REGIANTY / SUB REGIANTY	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARJET ANGGARAN PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PROKRAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PROKRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAKRAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARJET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara & Dikehambatkan	Unit		Unit	0 Unit	20.000.000,00	Semua Kabupaten, Kecamatan, Samudra Kidul/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	14	15	16	17
							0 Unit							0 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kelengkapan waktu penyempurnaan Dokumen Raperbup APBD/APBSD, kelengkapan waktu penyempurnaan laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, kelengkapan waktu penyempurnaan Dokumen Raperbup APBD/APBSD, kelengkapan waktu penyempurnaan KUALIPAS, kelengkapan waktu penyempurnaan balok transfer, kelengkapan waktu penyempurnaan Dokumen Raperbup APBD/APBSD	Status Perish Status Perish Status		Status Perish Status Perish Status	Tepat Waktu Status 100 Perish	2.091.285.002,00						Tepat Waktu Status 100 Perish	0,00	
							Tepat Waktu Status 100 Perish							Tepat Waktu Status 100 Perish		
	5.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1. Penyiapan Dokumen Perish yang sesuai 2. Penyempurnaan Dokumen Anggaran Daerah yang terakumulasi	Perish Perish		Perish Perish	100 Perish 100 Perish	1.088.184.302,00						0 Dokumen	0,00	
	5.02.02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penurunan Kapsida Daerah tentang Penyempurnaan APBD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKSIAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN INERJIA DAN KERANGKACA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PROGRES MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENUNGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2			5	6	7	8	0	15	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	804.000.802,00	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	PP7 - Peta rancangan Kelembagaan, Kemitraan, dan Inovasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Dokumen	15	16	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	136.357.500,00	Semua Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PP7 - Peta rancangan Kelembagaan, Kemitraan, dan Inovasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Dokumen		0 Dokumen		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.08		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen					PP7 - Peta rancangan Kelembagaan, Kemitraan, dan Inovasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PACU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PACU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rincian serta Kibijakan Barang Anggaran	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	55.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7: Peningkatan Kualitas Pemerintahan, Ketertarikan Ummat dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di Jember Timur	0 Dokumen	0,00		BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengalokasian Dana	Proentase pemenuhan SP2D yang tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	232.410.700,00						0 Dokumen	0,00	
5.02.02.2.02.10		Penyusunan Peruntuk Tambahan Adhistrasi Keuangan yang Berjalan dengan Pemasaran dan Pengalokasian Kes serta Pendistribusian Sub Kegiatan	Jumlah Peruntuk Tambahan Adhistrasi Keuangan yang Berjalan dengan Pemasaran dan Pengalokasian Kes serta Pendistribusian Sub Kegiatan	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	232.410.700,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pelaksanaan dan Tripartit Pelayanan Publik	PP7: Peningkatan Kualitas Pemerintahan, Ketertarikan Ummat dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat di Jember Timur	0 Dokumen	0,00		BADAN PENGELUARAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Perentase dokumen pelaporan keuangan administratif Daerah yang dalam sesuai ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	765.720.000,00						0 Dokumen	0,00	
5.02.02.2.03.02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Awal, Kevaluan, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Belanja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA STRA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA STRA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					PRORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERINGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4 Jumlah Dokumen Hasil Rekrutasi dan Verifikasi Ases, Keunggulan, Efikasi Pendidikan, Belajar, Pembelajaran, dan Peningkatan-LO dan Suban	5 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	8 0 Dokumen	9 0	10 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan	13 PP7: Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketahanan Sistem Pemerintahan yang Berkeadilan	14	15 0 Dokumen	16 0,00	17 BADAN PELOLAJIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2 03 04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BILD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BILD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	Laporan	Laporan	0 Laporan	450.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAU)		PP7: Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketahanan Sistem Pemerintahan yang Berkeadilan		0 Laporan	0,00	BADAN PELOLAJIAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5 02 02 2 04		Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	Penerbitan realisasi pertanggung jawaban keuangan daerah	Persien		Persien	100 Persien	3.990.000,00						0 Laporan	0,00		
5 02 02 2 04 07		Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah	Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGKOR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKA PEINDAHAAH					KELOMPOK SASARAN	PROGSAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11	12		13	14		15
1	2		Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebutuhan dan Alokasi Struktur	Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PELUANG ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat kegiatan komunitas dalam Desa/ Kota melalui Pelayanan Publik	PP7 - Peta Agricultural Kerangka Kerangka Urban dan Urban dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Laporan	10	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.04.08			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PP7 - Peta Agricultural Kerangka Kerangka Urban dan Urban dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Laporan		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5.02.02.04.09			Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PP7 - Peta Agricultural Kerangka Kerangka Urban dan Urban dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	0 Laporan		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4 Jumlah Laporan Hasil Pengeloaan Dana Daerah dan Melipisasi	5 Laporan	6	7 Laporan	8 0 Laporan	9 3.000.000,00	10 - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13 PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Kelembagaan, dan peningkatan pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7 Penguatan Masyarakat dalam Pembiayaan dan Menciptakan Swasana yang Sehat, Toleran, Terbuka, dan Nyaman	14 0 Laporan	15 16 0,00	17 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PP7 - Peningkatan Kelembagaan, Kelembagaan, dan peningkatan pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur 7 Penguatan Masyarakat dalam Pembiayaan dan Menciptakan Swasana yang Sehat, Toleran, Terbuka, dan Nyaman	0 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANKIB PERENCANAAN RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRANUNJUKAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CUAPAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRANUNJUKAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	FAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	12		13	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							8	9	10	11	12	13		15	16		
3	5.02.03	PROGRAM PENGSELALAMAN BARANG MILIK DAERAH	Prosedur awal tetap untuk setiap barang berantah Presentase OPD yang report waktu dalam penyempulan laporan BMD Presentase pemantauan BMD yang diproses Presentase pemantauan BMD yang diproses melalui sistem	Person Person Person Person Person	Person Person Person Person Person	Person Person Person Person Person	82,81 Person 100 Person 100 Person 100 Person	4.226.972.318,00					82,81 Person 100 Person 100 Person 100 Person	0,00	17		
	5.02.03.2.01	Pengeluaran Barang Milik Daerah	1. Persentase pemantauan pendataan aset/fitur tanah yang diproses oleh BPN 2. Persentase pemantauan pemdatangan BMD yang diproses 3. Jumlah OPD yang report waktu dalam penyempulan laporan BMD 4. Persentase pemantauan pemantauan BMD yang diproses	Person Person OPD Person	Person OPD Person	Person OPD Person	100 Person 48 OPD 100 Person	4.226.972.318,00					0 Laporan	0,00			
	5.02.03.2.01.05	Perencanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemantauan Barang Milik Daerah	Laporan	Laporan	Laporan	0 Laporan	640.760.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PERDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pertumbuhan dan Daya Saing Masyarakat	PP7 - Penanganan Kebutuhan Umum dan Perumahan Publik	0 Laporan	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.03.2.01.07	Pengelolaan Barang Milik Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET ANGER PERIODE RENCANA KERJA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKORAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELompok Sasaran			PRAKORAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGGUGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
											NASIONAL	DAERAH							
1	2		Jumlah Laporan Hasil Pengimanan Barang Adik Daerah	Laporan		Laporan	0 Laporan	2.785.680.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11	12	13	14	15	10	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5 02 03 2 01 10		Optimisasi Pengiriman, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Adik Daerah	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	819.307.319,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	X		Jumlah Dokumen Hasil Optimisasi Pengiriman, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang Adik Daerah	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00									0,00		
	XXX							0,00									0,00		
1	XXX01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan operator perangkat daerah terhadap pelayanan Administrasi	Persen		Persen	80 Persen	0,00							80 Persen	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKTIK CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDAMAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKTIK MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENGGUGUNG JAWAB			
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan pelayanan masyarakat	status	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Barisan Logistik Kantor					0 Pabrik	0,00	Semua Kecamatan, Kecamatan Samudra Kajidasa			PD7 - Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pemertanian dan Mencipokkan Produk Pertanian	0 Pabrik	0,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunyungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunyungan Tamu	Laporan			0 Laporan	0,00	Semua Kecamatan, Kecamatan Samudra Kajidasa			PD7 - Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pemertanian dan Mencipokkan Produk Pertanian	0 Laporan	0,00			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Perumahan Daerah	Penyediaan (penyediaan) jasa penyediaan administrasi perumahan	Persan			80 Persan	0,00				PD7 - Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pemertanian dan Mencipokkan Produk Pertanian	0 Laporan	0,00			
	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Suntu Memutus															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUN PERIODE REKORD OPD	REALISASI CAPAIAN REKORD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET REKORD OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRANIRAH NAIJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENUNGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2		Amplita Layanan Penyediaan Jasa Sifat Masyarakat	Laporan		Laporan	0	0,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12	13	14	15	16	17	
							0 Laporan	0,00					0 Laporan		0,00	BADAN PENGELOLAAN KELAHIRAN DAN ASET DAERAH	
JUMLAH								20.028.928.101,00									0,00

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan, sebagai implementasi dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Renstra BPKAD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026.

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 diharapkan menjadi bahan bagi Aparatur BPKAD Kabupaten Sidoarjo dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan bersama untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sidoarjo, 10 April 2023

KEPALA BADAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



CHUSNUL INAYAH, SE

NIP. 19720317 199602 2 001